

Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pendidikan Di Sekolah Dan Kaitannya Dengan Supervisi Profesional

¹Imam Septyan Riwayanto, ²B Herawan Hayadi, ³Furtasan Ali Yusuf, ⁴Rouf, ⁵Rouf Rohim

^{1,4,5}Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Email: ¹imamseptyanriwayanto@gmail.com, ²b.herawan.hayadi@gmail.com, ³fay@binabangsa.ac.id, ⁴ghavayasyfiatharouf@gmail.com, ⁵rouffurrohiem@gmail.com

Abstrak

Mutu pelaksanaan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan pegawai tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang diamanatkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Kualitas fungsi-fungsi kegiatan administrasi pendidikan yang memungkinkan terjaminnya mutunya adalah yang disupervisi oleh pengawas profesional yang memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi.

Kata Kunci: Administrasi Pendidikan, Pengawasan Profesional

Pendahuluan

Tujuan pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik untuk memastikan mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sesuai dengan UUD dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kualitas administrasi pendidikan sangat penting. Administrasi pendidikan, sebagai kegiatan bersama, hadir di mana-mana selama ada manusia yang hidup dan bekerjasama dalam kelompok. Secara teoretis, administrasi diartikan sebagai pelayanan secara intensif. Secara etimologis, dalam bahasa Inggris, "administer".

Di lingkungan pendidikan Indonesia, konsep supervisi telah diterapkan secara resmi sejak diberlakukannya Keputusan Menteri P dan K, RI, Nomor 0134/1977. Keputusan ini menjelaskan siapa yang dapat dianggap sebagai supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah tingkat kecamatan, pengawas di tingkat kabupaten/Kotamadya, serta staf kantor bidang yang ada di setiap provinsi. Perubahan dalam penggunaan istilah pengawas juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/Tahun 1992.

Istilah "pengawas" secara khusus digunakan untuk merujuk kepada supervisor pendidikan di sekolah, sementara istilah "penilik" diperuntukkan untuk pendidikan luar sekolah. Standar mutu pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pengawas sekolah memiliki peran ganda sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial. Dalam peran sebagai supervisor akademik, tugas pengawas adalah membantu meningkatkan kemampuan profesional guru untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran. Sementara dalam peran sebagai supervisor manajerial, pengawas bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam mencapai efektivitas sekolah. Kedua aspek tersebut, pembinaan dan pengawasan, dianggap sebagai tugas pokok pengawas sekolah, dan posisinya tidak hanya sebagai jabatan formal di kantor dinas pendidikan, tetapi sebagai agen penggerak kemajuan pendidikan di sekolah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pendidikan di Indonesia, peran dan tanggung jawab pemimpin pendidikan secara umum, dan kepala sekolah secara khusus, telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut melibatkan tiga aspek utama:

tujuan, ruang lingkup tanggung jawab, dan sifat kepemimpinan. Perubahan dalam tujuan pendidikan juga mempengaruhi luasnya tanggung jawab yang harus diemban oleh pemimpin pendidikan, dan ini juga memodifikasi sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas supervisor melibatkan merangsang guru-guru untuk memecahkan masalah pengajaran dan mengembangkan kurikulum. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan guru-guru sebagai bahan in-service, survei sebagai permintaan, dan observasi. Rencana pelaksanaan in-service program, evaluasi, dan pengembangan rencana pengajaran untuk staf juga menjadi tanggung jawab supervisor. Mencatat partisipasi guru-guru dan mengukur keberhasilan program in-service juga merupakan bagian dari tugas supervisor. Oleh karena itu, peran besar pemimpin pengajaran adalah mengubah guru-guru dari apatis menjadi dinamis, dari tidak mampu menjadi berkemampuan, dan dari tidak peduli menjadi peduli, kritis, dan mengerti tugas mereka sebagai guru, sebagaimana disampaikan oleh Sagala (2000).

Roland Barth mengungkapkan bahwa kebutuhan akan interaksi dengan guru mendorong pertumbuhan, dan dia mengidentifikasi tiga kelompok guru berdasarkan karakteristiknya:

1. Guru yang tidak memiliki kemampuan untuk secara kritis memahami praktek mengajar, tidak memperhatikan pendapat orang tua murid, dan kurang peduli terhadap metode pengajaran mereka.
2. Guru yang memiliki kemampuan untuk terus-menerus melakukan penelitian menunjukkan apa yang mereka lakukan dan menggunakan hasil penelitian tersebut untuk melakukan perubahan.
3. Hanya sedikit guru yang bersedia dan mampu melakukan penelitian secara cermat dan kritis terhadap praktek mengajar mereka sendiri dan orang lain, serta memberikan penilaian positif terhadap pekerjaan mereka (Mintarsih Danumihardja, 2009).

Program supervisi biasanya mencakup kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab mereka. Program ini mencakup berbagai tindakan yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga peserta didik dapat lebih cepat mengembangkan potensi mereka karena guru memiliki keterampilan pengajaran yang lebih baik. Dalam pengertian Djarm'an Satori (1997), program supervisi akademik bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar, sehingga pembinaan dapat relevan dengan peningkatan kemampuan profesional guru. Program supervisi harus realistis dan dapat dilaksanakan agar benar-benar membantu meningkatkan kinerja guru. Menurut Oteng Sutisna (1983), program supervisi yang baik mencakup seluruh proses pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar mengajar yang mendukung, melibatkan maksud dan tujuan, pengembangan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan pengembangan pengalaman belajar murid, baik dalam kurikuler maupun ekstrakurikuler (Bang Mohtar, 2012).

Prinsip program supervisi adalah memberikan motivasi yang kuat bagi pertumbuhan kemampuan profesional guru dalam mengajar, menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan mutu sekolah dengan dukungan dari semua pihak, termasuk dana dan fasilitasnya. Program ini bukanlah kegiatan tambahan atau suplemen (Suhardan, 2010; Ruzi Rahmawati, 2012).

Setiap bidang kegiatan membutuhkan perencanaan yang sistemik dan prospektif untuk mencapai tujuan secara efektif. Supervisi bertujuan untuk mendorong guru agar mengembangkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif. Oleh karena itu, perencanaan dalam supervisi harus dilakukan dengan baik, karena tanpa perencanaan yang baik, supervisi hanya akan mengecewakan para pihak yang terlibat, termasuk guru, kepala sekolah, supervisor, dan terutama murid-murid yang mengharapkan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan (Masaong, 2013)

Sebagai pemimpin guru, pengawas harus merancang rencana untuk memperkuat implementasi keempat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki visi dan misi pengawasan yang dapat diwujudkan dalam tujuan. Kurangnya efektivitas pelaksanaan supervisi selama ini disebabkan

oleh kekurangan visi dan misi yang jelas dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Pelaksanaan supervisi terkesan dilakukan secara asal-asalan dan tidak memperhatikan kebutuhan guru, sehingga menimbulkan kekurangan kepercayaan dari guru terhadap kemampuan pengawas dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Program supervisi harus mengikuti visi, misi, tujuan, dan strategi pembinaan yang ditetapkan oleh pengawas. Keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja pengawas sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dan kemampuan manajerial kepala sekolah (Masaong, 2013).

Rencana kerja pengawas yang terkait dengan supervisi manajerial harus mengacu pada fungsi dan substansi manajemen sekolah. Fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Substansi manajerial sekolah melibatkan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengawas perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami manajemen sekolah sebagai sistem yang terintegrasi antara fungsi dan substansi manajerial. Keefektifan pelaksanaan substansi manajemen di sekolah sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dari perencanaan hingga pelaporan, seperti yang terlihat pada gambar di halaman berikut. Tugas pengawas untuk membantu kepala sekolah dalam merumuskan visi dan misi sekolah binaan hingga dituangkan dalam rencana kerja sekolah sangat penting.

Ada beberapa aspek yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan program supervisi manajerial menuju sekolah yang efektif, antara lain: kepemimpinan yang profesional, fokus pada kualitas pembelajaran, keefektifan pencapaian indikator pembelajaran, berorientasi pada visi, misi, dan tujuan sekolah, harapan tinggi bagi semua peserta didik, akuntabilitas pengelolaan sekolah, penciptaan masyarakat belajar bagi warga sekolah, stimulasi/dukungan lingkungan sekolah (Creemers dalam Masaong, 2013). Rivai (1981) menyebutkan beberapa karakteristik perencanaan supervisi, seperti tidak adanya rencana standar, memerlukan kreativitas, komprehensif, kooperatif, dan fleksibel. Penyusunan rencana supervisi yang efektif memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang beragam. Faktor mana yang lebih diperlukan tergantung pada situasi, kondisi tempat penyusunan rencana, dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap supervisor harus menyadari peranannya sebagai kepala sekolah, penilik/pengawas, atau pemegang otoritas administratif, dan dapat menentukan faktor mana yang lebih diperlukan untuk menyusun rencana sesuai dengan situasi dan tujuan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan studi dokumen berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal pada berbagai sumber elektronik seperti perpustakaan digital, internet, dan koleksi jurnal perpustakaan. Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Scholar. Kata kunci yang digunakan untuk mencari jurnal adalah "supervisi oleh pengawas sekolah" dan "hasil penelitian". Dari hasil penelusuran, ditemukan 26 jurnal, dan dipilih yang memenuhi kriteria, yaitu adanya data mengenai 1) langkah-langkah supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, 2) dampak pengawasan terhadap guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, 3) kendala dan faktor pendukung yang dihadapi pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setelah diseleksi, terpilih 9 hasil penelitian. Berikut adalah urutan tahun terbit dari kesembilan hasil penelitian yang dipilih:

1. Makmurrizal, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, 2016. Implementasi Supervisi oleh Pengawas Sekolah untuk Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru di SMA Negeri 2 Bandar Baru Pidie Jaya.
2. Ahmad Ihsanuddin, 2015, Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SD di Kecamatan Berbah Sleman.
3. Diaz Wiryawan, 2015. Kontribusi Partisipasi Guru Dalam Kelompok Kerja Guru

(KKG) dan Intensitas Supervisi Akademik oleh Pengawas Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kotagede Yogyakarta

4. Shokhikhah, N. I., & PD, S. 2015. Pelaksanaan Supervisi Akademik Terhadap Guru Bahasa Arab (Studi Kasus di MTs Negeri Parakan Temanggung).
5. Dewi Novrita, 2014. Maksimalisasi Peran Pengawas Sekolah Menengah Atas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI Studi Kasus Pada Kementerian Agama di Kota Jayapura, Papua
6. Julkarnain Syawal, Badrun Kartowagiran, 2013. Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah Dalam Melakukan Supervisi Penyelenggaraan Pendidikan SD di Kota Tidore Kepulauan.
7. Latifa Saleh, 2013. Evaluasi Program Pengawas di SDN Se Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
8. Rachmat Suliadi, 2009. Hubungan Antara Supervisi Pengawas Sekolah, Inten-sitas Kegiatan MGMP dan Motivasi Berprestasi Guru dengan Profesi-nalisme Guru SMA Negeri di Kota Malang
9. Nur Muhammad, 1988. Manajemen Pengawas dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Pada PAUD di Kota Banda Aceh. Dari ke 9 hasil penelitian itu selanjutnya dilakukan Meta Analisis.

Hasil penelitian dari sembilan studi seperti yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan dan dirangkum dalam tiga tabel berikut.

Tabel 1. Langkah-langkah Supervisi oleh Pengawas Sekolah

No	Langkah Supervisi oleh Pengawas Sekolah
1	Pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah belum terprogram, sehingga belum dapat meningkatkan profesionalisme guru secara optimal. Teknik supervisi yang dilakukan bersifat umum dan kurang mengarah pada peningkatan profesionalisme guru. Keterbatasan waktu dan perencanaan yang belum optimal menjadi kendala.
2	Pelaksanaan supervisi akademik di MTs N Parakan melibatkan pengawas dan kepala madrasah. Kegiatan supervisi melibatkan tim sembilan dengan teknik individual dan kelompok. Evaluasi penilaian kurang terarah dan penggunaan instrumen yang belum optimal menjadi kendala.
3	Pelaksanaan supervisi terhadap guru bahasa Arab di MTs N Parakan melibatkan tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian/pelaporan. Pembinaan supervisi lebih fokus pada pembuatan program, pelaksanaan program, penilaian/pelaporan, dan rencana tindak lanjut. Penilaian langsung tanpa menggunakan instrumen menjadi kelemahan.
4	Penyusunan program pengawasan mendapat skor baik, pelaksanaan program sangat baik, evaluasi hasil pelaksanaan program berprestasi sedang, dan pembimbingan profesional guru dan kepala sekolah cukup baik.
5	Evaluasi penyusunan program pengawas berjalan efektif sesuai perencanaan program supervisi. Evaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan sesuai aturan, dan evaluasi pembimbingan dan pelatihan memberikan hasil positif dari berbagai pihak.
6	Perencanaan program kerja pengawas PAUD disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan pengawas PAUD melalui supervisi akademik dan manajerial. Pelaksanaan dan evaluasi program sesuai dengan ketentuan supervisi. Evaluasi dilakukan oleh Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dengan hasil positif.
7	Penyusunan program supervisi belum terprogram secara optimal [1]. Pengawas yang menyusun program bekerja sama dengan kepala sekolah binaan, menciptakan variasi program supervisi antar sekolah. Program supervisi memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah binaan. Para pengawas merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan

No	Langkah Supervisi oleh Pengawas Sekolah
	Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Program supervisi terdiri dari supervisi akademik/pengajaran dan supervisi manajerial.

Tabel 2. Hasil Pengawasan dan Evaluasi Program

No	Hasil Pengawasan dan Evaluasi Program
1	Program supervisi belum terprogram secara optimal [1]. Program supervisi memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah binaan. Program supervisi terdiri dari supervisi akademik/pengajaran dan supervisi manajerial.
2	Pelaksanaan program supervisi berprestasi baik, dan evaluasi hasil pelaksanaan program berprestasi sedang.
3	Evaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan sesuai aturan, dan evaluasi pembimbingan dan pelatihan memberikan hasil positif dari berbagai pihak.
4	Evaluasi dilakukan oleh Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dengan hasil positif.

Tabel 3. Peran dan Keterlibatan Pengawas dalam Program Supervisi

No	Peran dan Keterlibatan Pengawas dalam Program Supervisi
1	Peran pengawas dalam pelaksanaan supervisi belum optimal akibat kurangnya perencanaan dan waktu yang terbatas.
2	Pengawas turut serta dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial dengan melibatkan kepala madrasah. Evaluasi penilaian kurang terarah dan penggunaan instrumen yang belum optimal menjadi kendala.
3	Pengawas terlibat dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian/pelaporan supervisi terhadap guru bahasa Arab. Pembinaan supervisi lebih fokus pada pembuatan program, pelaksanaan program, penilaian/pelaporan, dan rencana tindak lanjut.
4	Pengawas terlibat dalam penyusunan program supervisi dengan bekerja sama dengan kepala sekolah binaan. Program supervisi menciptakan variasi antar sekolah dan memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Program supervisi terdiri dari supervisi akademik/pengajaran dan supervisi manajerial.

Dari hasil penelitian, terdapat variasi dalam pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah, termasuk perbedaan dalam penyusunan program supervisi dan evaluasinya. Beberapa pengawas telah terlibat aktif dalam melibatkan kepala sekolah dan menyusun program supervisi, sementara yang lain belum melibatkan kepala sekolah dan belum menyusun program supervisi dengan optimal. Evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi juga memberikan gambaran beragam, dari baik hingga sedang. Peran dan keterlibatan pengawas dalam program supervisi memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil yang dicapai.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi oleh pengawas meliputi kehadiran pengawas yang memberikan motivasi kepada para kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan program pembelajaran. Selain itu, adanya motivasi dari guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara optimal, dan mengembangkan berbagai metode mengajar juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Dari uraian hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah dapat dikategorikan menjadi dua versi, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Meskipun demikian, masih belum terdapat program tindak lanjut yang dirancang oleh pengawas. Beberapa pengawas bekerja sama dengan kepala sekolah dalam menyusun program supervisi, menciptakan variasi dalam program tersebut di antara sekolah-sekolah.
2. Program supervisi yang disusun oleh pengawas memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah binaan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Program ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu supervisi akademik/pengajaran dan supervisi manajerial. Beberapa pengawas juga aktif dalam memberikan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru dan kepala sekolah.

3. Pelaksanaan supervisi didasarkan pada perencanaan/program yang telah disusun, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian/pelaporan. Kegiatan supervisi dilakukan dengan berbagai teknik, baik individual seperti kunjungan dan observasi kelas, pertemuan/percakapan individual, maupun teknik kelompok seperti mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan MGMP, workshop, diklat, seminar, dan rapat guru.
4. Evaluasi program pengawasan menghasilkan hasil yang bervariasi, mulai dari tingkat sedang hingga menunjukkan hasil yang positif. Evaluasi ini dilakukan oleh Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota, dengan penilaian yang mencakup berbagai aspek seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan.
5. Hasil pengawasan memberikan dampak bagi guru dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam hal evaluasi program supervisi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil, bahkan dampak program tersebut. Evaluasi terhadap perencanaan supervisi, kecuali bagi yang tidak menyusun program, menunjukkan bahwa penyusunan program pengawasan memperoleh nilai baik.

Hambatan yang dihadapi oleh pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka melibatkan sejumlah faktor, termasuk kondisi geografis yang tidak mendukung dan keterbatasan sarana serta prasarana umum. Beberapa kendala lainnya mencakup kurangnya jumlah tenaga pengawas, beban kerja yang tinggi dengan banyaknya guru yang harus dibina, dan kurangnya intensitas supervisi, terlihat misalnya satu orang pengawas harus mengawasi 16 SMA. Kendala lainnya mencakup kurangnya keahlian pengawas dalam menyusun program supervisi, kualifikasi yang tidak selaras dengan kualifikasi guru pada bidang studi masing-masing, minimnya pengetahuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pengawas, serta kekurangan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kurangnya kejujuran dan kurangnya penyampaian informasi oleh guru maupun kepala sekolah saat pengawasan berlangsung juga menjadi faktor kendala.

Di sisi lain, faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi oleh pengawas adalah kehadiran pengawas itu sendiri, yang dapat memberikan motivasi kepada kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan program pembelajaran. Adanya motivasi dari guru untuk meningkatkan kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan melatih berbagai metode pengajaran juga menjadi faktor pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Diaz, W. (2015). Kontribusi Partisipasi Guru Dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Intensitas Supervisi Akademik Oleh Pengawas Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2007). Naskah Materi Diklat Pembinaan Kompetensi untuk Calon Kepala Sekolah/ Kepala Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
3. Hardja Sapoetra. (2010). Supervisi Pendidikan (Administrasi dan Supervisi Pendidikan). <http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/supervisi-pendidikan-administrasi-dan.html>
4. Ihsanuddin, A. (2015). Implementasi Supervisi Pengawas PAI Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SD di Kecamatan Berbah Sleman. Doctoral dissertation, IAIN Surakarta.
5. Imam Gozali. (2011). Prosedur Pengembangan Sistem Supervisi Pendidikan. <http://pujakesuma-igmafazizah.blogspot.co.id/2011/10/prosedur-pengembangan-sistem-supervisi.html>



6. Makmurrizal, C. Z. H., & Ibrahim, S. (2016). Pelaksanaan Supervisi Oleh Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Pada SMA Negeri 2 Bandar Baru Pidie Jaya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(3).
7. Masaong, A.K. (2013). *Supervisi Pengajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
8. Mintarsih Danumihardja. (2009). *Pengelolaan Pendidikan dan Profesi Tenaga Kependidikan*. http://miendanu.blogspot.co.id/2009_07_01_archive.html
9. Mintarsih Danumihardja. (2009). *Supervisi Pendidikan*. <http://tenaga-kependidikan.blogspot.co.id/2009/03/supervisi-pendidikan.html>
10. Muhammad, N. (2013). *Manajemen Pengawas Dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Banda Aceh*. Doctoral dissertation.
11. Olivia, Peter F. (1984). *Supervision for Today's School*. New York: Longman.
12. Rivai, M.A. (1981). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Yennars.
13. Ruzi Rahmawati. (2012). *Program Supervisi Pendidikan dan Program Pembinaan Guru*. <http://ruzirahmawati.blogspot.co.id/2012/03/program-supervisi-pendidikan-dan.html>
14. Sagala, H.S. (2000). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
15. Saleh, L., & Sumar, W. T. (2013). *Evaluasi Program Pengawas di SDN Se Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*. *KIM Fakultas Ilmu Pendidikan*, 1(1).
16. Satori, Djam'an. (1997). *Supervisi Akademik (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Depdikbud.
17. Shokhikhah, N. I., & PD, S. (2015). *Pelaksanaan Supervisi Akademik Terhadap Guru Bahasa Arab (Studi Kasus di MTs Negeri Parakan Temanggung)*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Sudjana, Nana, dkk. (2006). *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta: Dirjen PMPTK Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas.